

SIKAP POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP KAUM  
ROHINGYA MENURUT MASYARAKAT DUSUN CEMOROHARJO DESA  
CANDIBINANGUN KECAMATAN PAKEM SLEMAN

*Oleh : Wardoyo (13144300059)*

Keanekaragaman manusia di seluruh dunia merupakan nikmat dan tantangan bagi setiap negara di seluruh penjuru dunia. Keberagaman dalam setiap negara berbeda-beda mulai dari keanekaragaman budaya, agama, ras, golongan, suku, dan warna kulit. Tantangan terbesar bagi suatu negara dalam menghadapi tingginya keanekaragaman adalah menjaga keseimbangan dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara meskipun di dalam suatu negara terdapat masyarakat yang majemuk. Sikap politik luar negeri yang ditunjukkan oleh setiap negara di dunia internasional berbeda-beda. Setiap negara memiliki pandangan tersendiri dalam menjalankan politik luar negeri. Politik luar negeri merupakan bentuk hubungan suatu negara yang berdampak kepada berbagai sektor kehidupan bangsa, seperti faktor ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, hukum, dan teknologi. Rohingya merupakan suatu kelompok yang mendiami suatu kawasan di wilayah negara Myanmar dengan mayoritas penduduknya memeluk agama islam.

Kaum Rohingya yang merupakan kaum minoritas di negara Myanmar terus mengalami tekanan sejak tahun 2012. Perseteruan antara kaum Rohingnya dan suku asli Myanmar semakin membuat posisi kaum Rohingya di negeri Myanmar terdesak. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dalam dunia internasional membuat pemerintah Indonesia bebas untuk membantu dan memberikan simpati

kepada semua negara yang mengalami permasalahan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri berupaya menjadi pelopor perdamaian di seluruh belahan dunia, Keberadaan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk islam terbesar di dunia membuat Indonesia turut bersimpati terhadap permasalahan yang di hadapi oleh kaum Rohingnya di Myanmar. Dalam kasus ini, pemerintah Indonesia diharapkan mampu menjadi pelopor adanya diskusi bagi kaum Rohingnya dan pemerintah Myanmar agar tercipta solusi dan keadilan bagi kaum Rohingnya. Sikap politik luar negeri pemerintah Indonesia yang bebas aktif diharapkan mampu memberikan bantuan nyata terhadap keberadaan kaum rohingya. Atas dasar kemanusiaan dan juga dasar keagamaan, masyarakat Dusun Cemoroharjo Candibinangun berpandangan bahwa pemerintah Indonesia harus terlibat aktif dalam upaya memberikan keadilan bagi kaum Rohingnya yang mengalami diskriminasi oleh pemerintah Myanmar. Masyarakat Dusun Cemoroharjo Candibinangun berpandangan bahwa pemerintah Indonesia dapat memberikan contoh kepada negara Myanmar bahwa pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan hal yang mutlak.

## **A. Sikap Politik Luar Negeri Indonesia**

### **1. Pengertian Politik**

Perkataan politik berasal dari bahasa yunani *Polistai*. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri (negara). Sedangkan *taia* berarti urusan”. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Selain itu politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik, lembaga masyarakat maupun perseorangan (DR.

Kaelan,2010:95). Untuk memberikan pengertian kata politik, disampaikan dulu beberapa arti kata politik dari segi kepentingan penggunaanya yaitu sebagai berikut.

a. Dalam arti kepentingan umum (*politics*)

Politik” dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan negara di pusat maupun di daerah, lazim disebut *politics* (dalam bahasa inggris) dan artinya adalah: Suatu rangkaian azas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki, disertai dengan jalan cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan (Walfariato,2014: 38).

b. Dalam arti kebijaksanaan (*policy*)

Politik dalam arti kebijaksanaan (*policy*) adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan, atau keadaan yang kita kehendaki. Jadi dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah adanya proses: pertimbangan, menjamin terlaksananya suatu usaha; dan pencapaian cita-cita/keinginan yang kita kehendaki (Lemhamnas, 1991: 178).

Politik Luar Negeri merupakan kebijakan suatu negara dalam mengatur hubungan dengan negara lain dalam lingkup dunia internasional. Dengan demikian, politik luar negeri tentu saja berbeda antara negara satu dengan negara lainnya tergantung pada tujuan nasional masing-masing negara. Politik luar negeri suatu negara pada hakikatnya merupakan hasil perpaduan dan refleksi dari kondisi dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi internasional. Demikian pula

halnya politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pengaruh faktor internal dan eksternal yang berkembang sesuai dengan dinamikanya yang terjadi. Posisi geografis strategis yang berada di persilangan dua samudra dan dua benua, susunan demografis dan sistem politik yang dianut antara lain merupakan aspek-aspek dari faktor dalam negeri yang mempengaruhi cara pandang dan cara Indonesia memposisikan diri dalam pencaturan tata hubungan internasional (Ganewati Wuryandari, 2011: 1).

## **B. Kaum Rohingya**

### **1. Pengertian**

Kaum Rohingya adalah sebuah kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine (juga dikenal sebagai Arakan, atau Rohang dalam bahasa Rohingya) di Burma. Rohingya adalah etno-linguistik yang berhubungan dengan bahasa bangsa Indo-Arya di India dan Bangladesh (yang berlawanan dengan mayoritas rakyat Burma yang Sino-Tibet). Menurut penuturan warga Rohingya dan beberapa ulama, mereka berasal dari negara bagian Rakhine.

### **2. Konflik Rohingya**

Pada 2013 sekitar 1,3 juta orang Rohingya menetap di Myanmar. Mereka mayoritas mendiami kota-kota Rakhine utara, di mana mereka membentuk 80-98% dari populasi. Media internasional dan organisasi hak asasi manusia menggambarkan Rohingya sebagai salah satu etnis minoritas yang paling teraniaya di dunia. Rohingya telah menuai perhatian internasional setelah kerusuhan negara bagian Rakhine pada tahun 2012. Lalu pada tahun 2015 ketika berlangsungnya perhatian internasional atas Krisis Pengungsi Rohingya dimana orang-orang

Rohingya menempuh perjalanan laut yang berbahaya dalam upaya melarikan diri ke beberapa negara . Kekerasan terbaru meletus di negara bagian Rakhine, Myanmar, yang banyak dihuni Muslim Rohingya. Gelombang kekerasan baru ini menandai eskalasi dramatis sejak Oktober 2016 lalu ketika milisi Rohingya melakukan serangan dengan skala yang lebih kecil. Para pengungsi menuduh aparat keamanan Myanmar dan kelompok militan radikal Buddha membakar desa-desa mereka. Pemerintah Myanmar berdalih, pasukan keamanan mereka sekadar mengambil langkah balasan terhadap serangan bulan lalu terhadap lebih dari 20 pos polisi oleh milisi Rohingya. Bentrokan susulan sesudah itu membuat banyak warga sipil baik Islam maupun Buddha, lari menyelamatkan diri dari desa-desa mereka. Setelah serangan milisi pada bulan Oktober 2016, militer melakukan operasi pembalasan yang keras, dan banyak warga Rohingya menuduh bahwa dalam operasi itu pasukan keamanan melakukan pemerkosaan, pembunuhan, pembakaran desa dan penyiksaan. Pada Agustus 2017 gerilyawan Rohingya yang bersenjatakan pisau dan bom buatan menyerang lebih dari 30 pos polisi di Rakhine utara, kata pemerintah. Bentrokan-bentrokan ini, membuat ribuan warga sipil dari kedua komunitas tersebut terusir. Dilaporkan bahwa sejumlah warga sipil juga meninggal dunia. Jumlah warga Rohingya yang menyelamatkan diri ke Bangladesh terus meningkat sejak serangan Agustus 2017. Badan pengungsi PBB, UNHCR, mengatakan bahwa sekitar 5.200 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Dikatakan 'beberapa ribu orang' berada di kawasan di sepanjang perbatasan Myanmar sementara yang sudah berada di dalam wilayah Bangladesh jumlahnya

lebih banyak lagi. Sebagian besar yang berada di perbatasan adalah perempuan dan anak-anak, dan dilaporkan bahwa ada orang-orang yang terluka di antara mereka.

### **C. PEMBAHASAN**

Berdasarkan pengamatan di lapangan Menurut warga masyarakat Dusun Cemoroharjo Candibinangun awal mula konflik rohingya adalah faktor kesenjangan ekonomi, politik dan akhirnya meluas menjadi isu konflik antar agama. Myanmar yang mayoritas beragama budha melarang pendudukannya untuk bergaul dengan etnis rohingya yang beragama islam karena masyarakat Myanmar berpendapat bahwa orang-orang muslim adalah sumber dari kekerasan, tetapi itu merupakan alasan agar etnis rohingya dibenci dan diusir bahkan dimusnahkan dari Myanmar, untuk memusnahkan etnis minoritas rohingya masyarakat mayoritas Myanmar menggunakan cara apapun bahkan dikategorikan tidak manusiawi rumah-rumah mereka dibakar, dilarang untuk beribadah, bahkan sampai dibunuh secara massal, kondisi tersebut semakin memburuk di saat pemerintah Myanmar melegalkan pihak militer Myanmar untuk menggunakan senjata demi mengontrol massa. Kaum Rohingya merasa hak asasi mereka sebagai warga negara tidak diakui oleh pemerintah Myanmar, hal ini diperkuat dengan permintaan pemerintah Myanmar untuk memindahkan satu juta penduduk Rohingya ke Bangladesh ataupun Negara lainya. Indonesia merupakan salah satu negara yang didatangi oleh kaum Rohingya dalam mencari tempat tinggal sementara. Salah satu tujuan mereka adalah kota aceh dan beberapa daerah lainya seperti makassar juga merupakan daerah yang didatangi etnis Rohingya. Selama konflik rohingya belum selesai, pemerintah indonesia memberikan komitmen untuk membantu para pengungsi

imigran etnis Rohingya tetapi pemerintah Indonesia memberikan batas waktu bahkan ada yang sampai keluar dari Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sudah melakukan pertemuan dengan Aung San Suu Kyi untuk membicarakan upaya penyelesaian masalah Rohingya. Dalam pertemuan tersebut, Menlu menyerahkan Formula 4+1, yang isinya:

1. Mengembalikan stabilitas dan keamanan
2. Menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan
3. Perlindungan kepada semua orang yang berada di negara bagian Rakhine, tanpa memandang suku dan agama
4. Pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan

Dalam hal kasus pembantaian kasus Rohingya yang terjadi di negara Myanmar, pemerintah Indonesia mengecam keras tindakan yang dilakukan di negara Myanmar. Atas dasar kemanusiaan dan rasa keagamaan, berbagai kalangan di Indonesia mengecam keras pembantaian yang terjadi di Myanmar. Pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan berupa tenda, makanan dan obat-obatan segera diserahkan Pemerintah Indonesia kepada pengungsi Rohingya yang kini berada di tempat-tempat penampungan di Bangladesh. Kepada para kaum rohingya di Indonesia Pemerintah memberikan bantuan berupa menampung sejumlah pengungsi terutama berada di provinsi Nanggroe Aceh Darusallam. Pemerintah Indonesia secara tegas mengutuk aksi pembantaian kaum Rohingya. Masyarakat Dusun Cemoroharjo Candibinangun menilai bahwa kasus Rohingya merupakan bentuk diskriminasi terhadap minoritas suatu kaum yang berada di negara.

Rohingya secara sejarah merupakan suku asli yang tinggal di negara Myanmar, dan terletak diantara perbatasan dengan negara Bangladesh. Kaum Rohingya secara agama memeluk ajaran agama islam, dan merupakan agama asli yang dipeluk sejak lama oleh penduduk di perbatasan Myanmar dengan Bangladesh. Pada awalnya, kaum Rohingya merupakan penduduk yang setia bertahan di negara Myanmar, ketika eksodus besar-besaran terjadi di perbatasan Bangladesh, tidak sedikit penduduk asli myanmar yang pindah ke negara bangladesh, sementara kaum Rohingya tetap bertahan di negara Myanmar. Alasan karena minortias pemeluk agama, membuat kaum Rohingya yang memeluk agama islam secara perlahan diasingkan oleh pemerintah Myanmar karena dominasi agama Budha. Masyarakat Dusun Cemoroharjo Candibinangun berpendapat bahwa kasus yang dialami oleh kaum Rohingya di myanmar merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Diskriminasi terhadap suatu kaum yang minoritas membuat kaum Rohingya harus meninggalkan negara sendiri dan diusir oleh pemerintah myanmar melalui militernya. Intimidasi terhadap kaum Rohingya di Myanmar sangat disayangkan oleh masyarakat Dusun Cemoroharjo Candibinangun yang menyamakan kasus Rohingya dengan kasus pembantaian di Sampit Kalimantan Tengah.

Kasus pembantaian, pengusiran, diskriminasi yang dialami oleh kaum rohingya merupakan permasalahan yang kompleks yang melibatkan banyak sektor dalam suatu negara. Pemerintah Myanmar terindikasi secara sengaja melakukan penindasan atas dasar minoritas agama terhadap suatu kaum. Dunia Internasional langsung bereaksi terhadap kasus yang terjadi di negara Myanmar, apalagi dilihat



bahwa secara sejarah, kaum rohingya adalah penduduk asli negara myanmar sejak dahulu.

Terusirnya kaum rohingya dari negara sendiri membuat negara-negara dunia bersimpati, termasuk Indonesia. Atas dasar sikap politik luar negeri yang bebas aktif, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengutuk keras kasus yang dialami oleh kaum rohingya. Pemerintah Indonesia mengharapkan kasus pembantaian terhadap kaum rohingya dihentikan, dan lebih mengedepankan adanya dialog antara pihak-pihak yang berkepentingan sehingga rohingya dapat diakui kembali di negara sendiri. Ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum rohingya turut membuat masyarakat Dusun Cemoroharjo Candibinangun merasakan simpati yang mendalam, sebagai sesama muslim masyarakat Dusun Cemoroharjo Candibinangun berharap pemerintah Indonesia terlibat aktif dalam upaya memperjuangkan kebebasan dan hak dari kaum rohingya di negara sendiri. Masyarakat Dusun Cemoroharjo Candibinangun berpandangan bahwa sebagai negara islam terbesar, pemerintah Indonesia juga harus mengambil sikap yang tegas, terutama bersuara dalam dunia internasional. Masyarakat Dusun Cemoroharjo Candibinangun menilai bantuan dari pemerintah Indonesia kepada kaum rohingya harus di pertegas. Pemerintah Indonesia juga harus memberikan batas waktu untuk para pengungsi kaum rohingya berada di Indonesia, jangan sampai bantuan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia disalahgunakan dan mendapat reaksi buruk dari masyarakat Indonesia.

Masyarakat Dusun Cemoroharjo Candibinangun berharap, pemerintah Indonesia berperan besar dalam upaya pembebasan dan penegakan HAM terhadap

kaum Rohingya. Masyarakat Dusun Cemoroharjo Candibinangun menilai, pemerintah mampu mengambil sikap dengan mengadakan dialog dan memberikan contoh kepada myanmar tentang arti kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan menjunjung tinggi HAM, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Bantuan berupa tempat untuk penampungan terhadap sebagian besar pengungsi yang merupakan kaum Rohingya oleh pemerintah Indonesia harus lebih ditingkatkan, namun juga harus diperhatikan reaksi dan unsur keadilan bagi masyarakat Indonesia sendiri. Masyarakat Dusun Cemoroharjo Candibinangun beranggapan bahwa pemerintah Indonesia dengan sikap politik luar negeri yang bebas aktif dapat memberikan bantuan lebih terhadap kaum rohingya yang di diskriminasi oleh pemerintah Myanmar.

Masyarakat Dusun Cemoroharjo Candibinangun mengharapkan pemerintah Indonesia melalui kerjasama antar negara-negara ASEAN. Melalui kerjasama antar negara-negara ASEAN inilah masyarakat Dusun Cemoroharjo Candibinangun menilai pemerintah Indonesia dapat lebih berkontribusi dalam upaya memberikan kebebasan terhadap kaum rohingya. Atas dasar kemanusiaan dan kesamaan agama, masyarakat Dusun Cemoroharjo Candibinangun berharap pemerintah Indonesia dapat mengambil sikap yang tegas kepada Negara Myanmar.

## DAFTAR PUSTAKA

Basrowi dan Suwandi. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Dadang Supardan. 2011. *Pengantar Ilmu sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ganewati Wuryani. 2016. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kaelan, M.S.2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sukardi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sumardi Suryabrata.2003. *Metode Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo.

Sunarto.2004.*Politik Indentitas Etnis*.Jakarta: Bumi Aksara.

Walfarianto.2014. *Pendidikan Kewarganegaraan*.Yogyakarta: Leutikaprio.

Politik Luar Negeri, <https://www.deplu.go.id>, (diakses tanggal 29 Mei 2017)

Rohingnya, <https://id.wikipedia.org>,(diakses tanggal 29 Mei 2017)

Indonesia, <https://id.wikipedia.org>,(diakses tanggal 15 Agustus 2017)